

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR: 500.12.1/060/HK-KS/IX/2026

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang :

a. bahwa pada prinsipnya Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik serta Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum serta memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib menetapkan pertimbangan tertulis atas klasifikasi informasi yang dikecualikan dimana telah dilakukan uji konsekuensi;
c. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 500.12.1/211/HK-KS/VII/2026 tentang Lembaga Pengelola Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Samarinda maka Sekretaris Daerah telah ditetapkan sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 18);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 493);

Memperhatikan : Hasil Pengujian Konsekuensi Nomor: 500.12.13/0896/100.17 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Agustus 2026.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2026
a.n. WALI KOTA SAMARINDA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH,

NENENG CHAMELIA SHANTI

Unduh **DOKUMEN ASLI** di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 3109A-2026-16-60-010

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR: 500.12.1/060/HK-KS/IX/2026
TENTANG
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 500.12.13/0696/100.17 TAHUN 2026

Pada hari ini, Selasa Tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Ruang Command Center, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
SEKRETARIAT DAERAH					
1	Proses Penilaian dalam seleksi Calon Direksi BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Bertentangan dengan prinsip kerahasiaan	Keputusan merupakan kewenangan internal	Selama berlangsungnya seleksi
2	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Yayasan Putera Sampoerna	UU KIP Pasal 17 huruf J; KUHPerdata Pasal 1320 dan 1338	Melanggar isi kesepakatan terkait kerahasiaan dokumen para pihak	Memenuhi klausula perjanjian terkait kerahasiaan dokumen para pihak	Sampai selesai masa pelaksanaan kontrak
SEKRETARIAT DPRD					
3	Dokumen arsip ASN dan anggota DPRD yang berisikan : daftar keuangan dan pendapatan pegawai, serta alamat rumah serta rekening dan tabungan bank. Dokumen rekam medis termasuk nomor register rekam medis	UU No. 14 2008 Ps. 17(h)	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia (lebih mudah penyalahgunaan data / penipuan terhadap pemilik data)	Melindungi kerahasiaan PNS, Penyalahgunaan data / informasi	Tidak terbatas
4	Arsip / dokumen naskah dinas yang klarifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, rahasia terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam aturan pelaksanaannya	1. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i; 2. UU no. 43 tahun 2009 tentang kearsipan	menyebabkan terganggunya tugas-tugas kedinasan dan privasi orang lain	Terjaganya kinerja organisasi	Sesuai Jadwal Retensi Arsip
5	Proses Pembahasan KUA dan PPAS serta Perubahan KUA dan PPAS	1. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 huruf e; 2. UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah	Mengungkap informasi yang masih dalam proses pembahasan	Menjaga informasi yang masih dalam proses pembahasan	Sampai Disahkan
SEKRETARIAT DPRD, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
6	Biodata Elektronik & Non Elektronik PNS (Database) (Semua SKPD)	- UU KIP Psl 17 huruf h - UU PDP Pasal 4	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman	- UU KIP Psl 17 huruf h - UU PDP Pasal 4	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
8	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi PNS / Pejabat yang berwenang (untuk pergeseran / mutasi)	- UU KIP Psl 6 huruf e	Menghambat proses penyusunan kebijakan	Menjaga proses penyusunan kebijakan	Selama proses penyusunan

SEKRETARIAT DPRD,BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KECAMATAN SAMBUTAN, KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG					
9	Daftar Penilaian Kinerja / SKP PNS (Semua SKPD)	UU KIP Pasal 17 huruf (h)	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
Inspektorat Kota Samarinda					
10	Laporan hasil audit (LHA) yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf I dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
11	Kertas kerja audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit yang mendukung laporan hasil audit (LHA)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
12	Dokumen laporan pengaduan individu/masyarakat	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; Pasal 44 Ayat (1) huruf H UU No 43 Tahun 2009	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
13	Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam benluk hardcopy maupun softcopy yang telah diberikan identitas rahasia (inspektorat)	Pasal 17 huruf I dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
14	Konfigurasi Database Aplikasi Pendidikan (Username dan Password)	Pasal 17 Huruf h UU No.14 Tahun 2008; UU ITE Pasal 30,31,32	Mengungkap Rahasia Database dan Aplikasi	Melindungi Database dan Aplikasi Serta Keamanan Sistem	Tidak Terbatas
15	Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Belum diaudit	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 6 huruf c	Dapat Menimbulkan Penyalahgunaan Dokumen Negara	Melindungi Dokumen Negara	Sampai proses audit selesai
16	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	UU No.14 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE	Penyalahgunaan Data Keuangan Oleh Pihak yang Tidak Berhak	Menghindari Kesalahpahaman Informasi Keuangan	Tidak Terbatas
17	Informasi Hasil Rapat Pemerintah Kota Samarinda yang Bersifat Tertutup (Laporan Singkat, Catatan,Notulen, Rekaman)	UU No.14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009	Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan Pemerintah	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas
18	Dokumen Laporan Pengaduan Masyarakat yang terkait isu SARA dan Radikalisme serta kerawanan sosial	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a, dan c;	Mengungkap data yang bersifat SARA, Radikalisme serta kerawanan sosial	Menjaga data yang bersifat SARA, Radikalisme serta kerawanan sosial	Selama diproses
19	MOU / SPK yang masih dalam Proses	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal	Informasi Dapat Disalahgunakan	Menjaga Objektivitas Penilaian	Sampai MOU / SPK terbit
20	Data Pribadi Pegawai ASN, PPPK, dan PPPK P	UU No.14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf h, UU PDP Pasal 4	Mengungkap Data Pribadi yang Bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi Pegawai	Tidak Terbatas
21	Data Pribadi Peserta Didik	UU No.14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf h, UU PDP Pasal 4	Mengungkap Data Pribadi Peserta Didik	Melindungi Data Pribadi Peserta Didik	Tidak Terbatas

22	Data Hasil Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Guru Berprestasi Sebelum Diumumkan	UU No.14 Tahun 2008; Pasal 6 huruf e	Dapat Menimbulkan Intervensi dan Keberatan Sebelum Penetapan	Menjamin Objektivitas Proses Seleksi	Sampai Hasil Resmi Diumumkan
23	Data Akun, Token, Sertifikat Elektronik Tanda Tangan Elektronik, dan Kode Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	UU ITE; Pasal 30, 31,32	Membahayakan Sistem Informasi Pemerintahan dan Berpotensi Terjadi Kebocoran Data	Menjaga Keamanan Informasi dan Keberlangsungan Layanan Elektronik	Tidak Terbatas atau Selama Sistem Digunakan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KECAMATAN SAMBUTAN, KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG, KECAMATAN SUNGAI KUNJANG, KECAMATAN LOA JANAN ILIR					
24	Data Pribadi Pelapor Pengaduan Pelayanan Publik	UU No. 14 Tahun 2008 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi rahasia pribadi	Tidak Terbatas
25	Exercise / Perhitungan APBD sebelum dibahas DPRD	UU No.14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009	Penyalahgunaan Data oleh Pihak yang Tidak Berhak	Menghindari Kesalahpahaman Informasi	Sampai Ditetapkan Dalam Perda
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG					
26	Disposisi Memorandum, Surat Menyurat dan Nota Dinas yang Menurut Sifatnya	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I; UU No. 43 Tah	Menganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Menjaga Proses Penyusunan Kebijakan	Sesuai Jadwal Retensi Arsip
DINAS KESEHATAN					
27	Laporan Layanan Program yang memuat identitas diri (data pribadi) pasien	- Pasal 17 huruf H Ayat 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 47 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data yang bersifat rahasia, kecuali untuk kepentingan khusus yang diatur dengan Undang-Undang	Melindungi data yang bersifat rahasia	30 tahun
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
28	Konfigurasi Database dan Aplikasi (Username dan Password) Disparkim	Pasal 17 Huruf h UU No.14 Tahun 2008; UU ITE Pasal 30,31,32	Mengungkap Rahasia Database dan Aplikasi	Melindungi Database dan Aplikasi Serta Keamanan Sistem	Tidak Terbatas
29	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian a. Skala Besar b. Bukan Skala Besar	UU KIP Pasal 6 huruf c	Mengungkap perencanaan yang belum matang dan dapat mengganggu proses pengembangan	Melindungi rencana pengembangan lingkungan	Selama masih dalam proses
30	Laporan Keuangan DPKP yang belum diaudit	- Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
31	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	- Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak Terbatas

32	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
33	Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan daerah	- Pasal 17 huruf e dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Tidak Terbatas
34	Informasi tentang program dan/atau kegiatan/sub kegiatan (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD)	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Sampai ditetapkan dalam Perda/Perwali
35	Informasi hasil rapat Pemerintah Kota Samarinda yang bersifat tertutup, meliputi: - Laporan singkat - Catatan Rapat - Risalah - Slide presentasi dan/atau rekaman, transkip suara/pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menggangu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD Pengolah surat
36	Dokumen laporan pengaduan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintahan dalam pelayanan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan
37	Disposisi memorandum dan nota dinas di Lingkungan Pemkot Samarinda yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menggangu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD Pengolah surat
38	Exercise/perhitungan APBD Pemkot Samarinda (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD, BPKAD, Bappeda)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Sampai ditetapkan dalam Perda
39	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa
40	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sanggah	- Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan	Sampai dengan penandatangan perjanjian/kontrak
41	Biodata elektronik & non elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

42	Daftar penilaian prestasi kerja/DP3 SKP PNS	- Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
43	Data Pribadi Kepegawaian yang berupa data pribadi	- Pasal 17 huruf h UU. No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; UU PDP Pasal 4	Data tersebut dapat mengungkap rahasia pribadi dan data pribadi yang dapat disalahgunakan pemanfaatannya oleh publik	Melindungi rahasia pribadi dan data pribadi yang dapat disalahgunakan pemanfaatannya oleh publik	Tidak terbatas
44	Surat Tugas / Sprint tugas yang bersifat rahasia, dalam penegakan Perda dan Perkada Kota Samarinda	- Pasal 17 huruf I UU. No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat mengungkap surat intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan	Menjaga surat intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan	Sampai dengan Surat Tugas / Sprint Tugas telah dilaksanakan
DINAS TENAGA KERJA					
45	Proses Penetepan dan Penangguhan UMP dan UMK	- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - Pasal 17 huruf I dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP - UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021	Menimbulkan permasalahan / polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif	Sampai dengan penetapan dan penangguhan UMP / UMK
46	Biodata Tenaga Kerja Asing	- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA)	Tidak Terbatas
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
47	Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (by Name - by address)	- UU KIP Psl 17 huruf h - UU PDP Pasal 4 - UU No 11 Tahun 2012 Pasal 19	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
48	Data by name by address (BNBA) yang menjadi responden dalam pendataan keluarga tahun 2025 (PK25)	- UU KIP Psl 17 huruf h - UU PDP Pasal 4	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Tidak terbatas
49	Data Keluarga Risiko Stunting KRS (BNBA)	- UU KIP Psl 17 huruf h - UU PDP Pasal 5	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Tidak terbatas
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
50	Internet protokol atau IP address private, bandwidth, dan kode akses elektronik	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data	Tidak Terbatas
51	Sistem keamanan elektronik, sistem management database	Pasal 30 sampai dengan pasal 37 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Mengungkap sistem keamanan	Menjaga Sistem Keamanan	Selama Digunakan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
62	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	- UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 (22); - UU KIP Psl 17 (h); - UU PDP Pasal 4	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Tidak Terbatas
63	Registrasi Akta Pencatatan Sipil	- UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 9; - UU KIP Psl 17 (h); - UU PDP Pasal 4	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Tidak Terbatas
64	Laporan Data Balikan dalam pemanfaatan Data Kependudukan yang sudah diberikan hak akses oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui perjanjian kerjasama dengan OPD/ Lembaga Pengguna	- UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 9; - UU KIP Psl 17 (h); - UU PDP Pasal 5	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Tidak Terbatas
65	Data dukung persyaratan yang diupload, file Kartu Keluarga (KK) dan akta yang diproses oleh OPD/ Lembaga melalui PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 9; - UU KIP Psl 17 (h); - UU PDP Pasal 6	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Tidak Terbatas
66	Akta dan Wasiat	Pasal 17 huruf h dan huruf l UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan pihak-pihak tertentu	Menjaga Kerahasiaan	Tidak Terbatas
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA					
57	Data Pemegang Fuel Card	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi; UU KIP Psl 17 huruf h	Digunakan untuk Masyarakat Umum untuk Mengatur Kuota Subsidi Biosolar	Perlindungan Data Pemegang Fuel Card Agar Dokumen Tidak Disalahgunakan	6 Bulan / 12 Bulan
58	Data Keamanan Website Dinas Perhubungan	Pasal 17 Huruf b, c. UU No14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU ITE Pasal 30,31,32	Dapat Dilhat Oleh Masyarakat Umum	Keamanan Sistem Lebih Terjamin	Tidak Terbatas
59	Data pribadi juru parkir	Pasal 17 Huruf h, UU No14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU PDP Pasal 4	Mengungkap kerahasiaan data pribadi	Menjaga kerahasiaan data pribadi	Tidak Terbatas
60	Identitas Pemilik Kendaraan KBWU (Kenderaan Bermotor Wajib Uji) dan Data Teknis Tertentu (Memuat data pribadi berupa nama pemilik, alamat, NIK, nomor telepon,	Pasal 17 Huruf h, UU No14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU PDP Pasal 4	Mengungkap kerahasiaan data pribadi	Menjaga kerahasiaan data pribadi	Tidak Terbatas
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda					
61	Data BNBA SSN	UU No 27 Tahun 2022 tig Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi penduduk	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
62	Data BNBA Pelapor 112	UU No 27 Tahun 2022 tig Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Tidak Terbatas

63	Data username dan pasaword aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	UU No 27 Tahun 2022 ttg Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Tidak Terbatas
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA					
64	By Name By Address / Data Pribadi Spesifik Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h, UU PDP Pasal 4	- Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia data pribadi	Tidak terbatas
65	Daftar Dokumen Koperasi yang Bermasalah	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Dapat menganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Selama Diperlukan
66	Data Pelaku usaha mikro by name, by address	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i, UU PDP Pasal 4	- Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia data pribadi	Tidak terbatas
67	Data pribadi penerima bantuan program restrukturisasi mesin atau peralatan industri	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h, UU PDP Pasal 4	- Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia data pribadi	Tidak terbatas
68	Dokumen pengajuan hak cipta dan hak paten	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Dapat menganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Selama Diperlukan
69	Akta legalitas perusahaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Dapat menganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Selama Diperlukan
70	Nomor Induk Koperasi (NIK)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Dapat menganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Selama Diperlukan
DINAS PERDAGANGAN					
71	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit), jka sudah diaudit, tertutup namun terbatas	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 78 Tahun 2022	1) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2) Mengganggu Pertanggungjawaban keuangan	1) Menyediakan data lengkap dalam proses pengawasan 2) Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Tidak ada batas waktu
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
72	Data Pribadi Anggota Perpustakaan (NIK, Alamat, No.HP)	UU KIP Pasal 17h	Penyalahgunaan Data	Melindungi Privasi	Tidak Terbatas

73	Data Peminjaman Buku Individu	UU KIP Pasal 17h	Ungkap Preferensi Pribadi	Menjaga Kerahasiaan	Tidak Terbatas
74	Arsip Rahasia Negara	- UU KIP 17l; - UU Kearsipan Pasal 44	Mengungkap arsip negara yang dirahasiakan	Menjaga kerahasiaan negara	Sesuai Jadwal Retensi Arsip
75	Arsip Statis Tertutup	UU KIP 17i	Mengungkap arsip negara yang dirahasiakan	Menjaga kerahasiaan negara	Sesuai Jadwal Retensi Arsip
76	Dokumen Perpustakaan dan Kearsipan yang Belum Diolah	UU KIP Pasal 6 Angka (3) huruf e	Info Tidak Valid	Menjaga validitas data	Sampai Selesai Pengolahan data
77	Sistem Kemanan (CCTV, akun/Password Sistem, server)	UU ITE Pasal 30,31,32	Mengungkap sistem keamanan	Menjaga Sistem Keamanan	Selama Digunakan
78	Daftar Data Evaluasi Pegawai Internal	UU KIP 17h	Penyalahgunaan Data	Melindungi Privasi	Tidak Terbatas
79	Arsip Berhak Cipta	UU Hak Cipta; UU KIP 17g	Pelanggaran Hukum	Lindungi Hak	Masa Hak Cipta
80	Pengaduan Yang Belum Diverifikasi	UU KIP 17i	Pencemaran nama baik	Menjaga Validitas	Sampai Verifikasi
DINAS PERIKANAN					
81	Data lokasi penangkapan ikan yang sensitif dan rawan eksploitasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf d (Perlindungan Kekayaan Alam)	Dapat disalahgunakan untuk penangkapan ikan ilegal atau perusakan lingkungan	Melindungi ekosistem dan mencegah praktek penangkapan ilegal	Hingga resiko penyalahgunaan tidak lagi relevan
82	Dokumen Strategi, rute, jadwal dan titik koordinat patroli pengawasan sumber daya perikanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a (Perlindungan Penegakan Hukum)	Kebocoran jadwal membuat pelaku penangkapan ikan ilegal (UU Fishing) dapat menloskan diri dan menghindari patroli	Menjaga efektivitas dan kerahasiaan operasi penegakan hukum di perairan	Sampai dengan kegiatan patroli pada periode tersebut selesai dilaksanakan
83	Data identitas pelapor pelanggaran di sektor perikanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a (2) dan h (Perlindungan Penegakan Hukum); UU PDP Pasal 4	Mengancam keselamatan pelapor	Melindungi pelapor dan partisipasi publik	Tidak Terbatas
84	Data Teknis hasil uji laboratorium kualitas perairan yang masih dalam tahap verifikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 huruf e	Dapat mengungkap data yang masih dalam tahap verifikasi	Menjaga data yang masih dalam tahap verifikasi	hingga hasil final dan resmi diterbitkan
85	Data Pribadi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar produk hasil perikanan (termasuk NIK, alamat, nomor kontak, data rekening bantuan, dll)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan UU No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (Perlindungan privasi & data pribadi)	Disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas atau praktek komersial tanpa izin, dapat digunakan untuk akses ilegal terhadap rekening atau penyalahgunaan bantuan	Melindungi hak privasi, keamanan menjaga kerahasiaan dan kepercayaan penerima bantuan	Tidak Terbatas
86	Data pribadi pegawai Dinas Perikanan (Data Keluarga, NIP, Golongan, Daftar Gaji, Dll)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan UU No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (Perlindungan privasi & data pribadi)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Tidak Terbatas
87	Rahasia dagang berupa formulasi pakan mandiri dan resep pengolahan produk yang belum dipatenkan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 huruf e	Dapat mengungkap data yang belum dipatenkan	Melindungi data yang belum dipatenkan	Selama masih diproses

88	Daftar kebijakan MoU, atau Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait sektor perikanan yang masih tahap pengkajian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik pasal 6 huruf e	Dapat mengungkap kebijakan MoU atau Perwali yang masih tahap pengkajian	Menjaga kebijakan MoU atau Perwali yang masih tahap pengkajian	Selama masih diproses
89	Detail Keamanan Sistem Informasi (Password, *Source Code* aplikasi perikanan, arsitektur jaringan internal Dinas)	Pasal 17 Huruf h UU No.14 Tahun 2008; UU ITE Pasal 30,31,32	Mengungkap Rahasia Database dan Aplikasi	Melindungi Database dan Aplikasi Serta Keamanan Sistem	Tidak Terbatas
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
90	Database PNS	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	30 Tahun
91	Data SPD	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; Permendagri No 77 Tahun 2020 ttg Pedoman Teknis Keuangan Daerah; Perwali Nomor 78 Tahun 2022 ttg Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Dapat menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	10 Tahun
92	Data SP2D	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; Permendagri No 77 Tahun 2020 ttg Pedoman Teknis Keuangan Daerah; Perwali Nomor 78 Tahun 2022 ttg Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Dapat menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	10 Tahun
93	Laporan Keuangan Unaudited	Pasal 17 huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Laporan keuangan unaudited dapat menimbulkan bias informasi jika disandingkan dengan laporan keuangan yang sebelumnya, sehingga tujuan laporan keuangan tidak tercapai	Melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai selelah selesai diaudit
BADAN PENDAPATAN DAERAH					
94	Database objek pajak dan retribusi	- Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; - Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang
95	Source Code / koding aplikasi dan data base wajib pajak	UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17b	Jika dibuka ke publik berarti memberikan informasi kode rahasia yang berpotensi disalahgunakan untuk menimbulkan gangguan terhadap sistem online	Keamanan sistem lebih terjamin	Sampai dengan ada perubahan aplikasi

96	Data wajib pajak	UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h angka 3 tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset bisa, bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai wajib pajak memberikan persetujuan tertulis
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG, KECAMATAN SUNGAI KUNJANG					
97	Data dan dokumen permohonan izin perceraian pegawai, meliputi surat permohonan dan dokumen pendukung lainnya	- UU KIP Psl 17 huruf h - UU PDP Pasal 4	1. Melanggar privasi pegawai yang bersangkutan; 2. Berpotensi terjadi pencemaran nama baik terhadap pegawai atau pasangan yang berperkara	Terlindunginya data pribadi pegawai dan/atau pasangan dari pegawai, saksi atau pihak lain yang terkait	Tidak Terbatas
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
98	Proses pemberian / penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian (BKPSDM & SKPD terkait)	- UU KIP Psl 17 huruf h - UU PDP Pasal 4	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
99	Data hasil tes potensi / kompetensi PNS / Pejabat (BKPSDM)	- UU KIP Psl 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas atau atas persetujuan yang bersangkutan / pihak yang berwenang
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
100	Informasi Intelejensi Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)	1) Pasal 17 huruf C UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi informasi negara dan kebocoran	Tidak ada batas waktu
101	Informasi hasil rapat Pemerintah Kota Samarinda yang bersifat tertutup, meliputi : Laporan Singkat, Catatan Rapat, Risalah Slide Presentasi dan/atau rekaman, transkrip suara/Pembicara, dan Keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) uu No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat menggangu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat
102	Dokumen laporan pengaduan	1) Pasal 17 huruf a dah huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; 2) Permendagri No 8 Tahun 2023 Pasal 60	Menurunkan kredibilitas dari pemeriksaan dalam pelayanan	menghindari terjadinya kesalah pahaman informasi dimata publik	Sampai dengan hasil
103	Disposisi memorandum dan Nota Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	1) Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP 2) Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009	Dapat menggangu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat
104	Dokumen Pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bedaharawan dan buku pembantu lainnya	1. Pasal 17 hurus j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 2. Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat menimbulkan penyalah gunaan dokumen negara	melindungi dan mengurangi penyalah gunaan dokumen negara	Tidak ada batas waktu
105	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang
106	Biodata pribadi ASN	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	melindungi data pribadi	Tidak terbatas

107	Data Penilaian Prestasi Kerja/DP3/SKP ASN	Pasal 17 huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Selama masih berlaku atau atas persetujuan ASN yang bersangkutan/pihak yang berwenang
BADAN PENDAPATAN DAERAH					
108	Data identitas lengkap wajib pajak daerah (nama, NIK, NPWPD, alamat, Objek Pajak)	1. UU No. 14/2008 Ps. 17 (h); 2. UU No. 1/2022 Ps. 93; 3. UU No. 28/2007 Ps. 34 (Kerahasiaan)	Pelanggaran privasi WP, penyalahgunaan data, hambatan kepatuhan sukarela	Melindungi privasi dan kepatuhan wajib pajak daerah	Tidak Terbatas
109	Rincian hasil pemeriksaan pajak daerah (LHPP/LHP) per WP	1. UU No. 14/2008 Ps. 17(h); 2. UU No. 28 /2007 Ps. 34	Bocornya strategi pemeriksaan, resistensi WP, sengketa hukum prematur	menjaga integritas proses pemeriksaan pajak Daerah	Tidak Terbatas
110	Data piutang pajak Daerah per WP beserta rincian tunggakan	1. UU. 14/2008 Ps. 17 (h); 2. UU No. 1/2022	Eksploitasi data oleh pihak ketiga, potensi guguatan tidak berdasar terhadap WP	Melindungi proses penagihan aktif dan hak privasi WP	Tidak Terbatas
111	Strategi dan target operasi penagihan aktif / gijzeling (penyanderaan) pajak Daerah	1. UU No. 14/2008 Ps. 17 (a); 2. UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa	Menggagalkan operasi penagihan paksa, pelarian / pengalihan aset WP	Memastikan efektivitas peagihan pajak Daerah secara paksa	Sampai eksekusi penagihan selesai
112	Informasi intelijen pajak Daerah (analitik risiko, profil kepatuhan, scoring WP)	1. UU 14/2008 Ps. 17 (a)(h); 2. UU No. 1/2022 Ps. 93	Menurunkan efektivitas pengawasan, WP menyesuaikan perilaku untuk hindari deteksi	Menjaga efektifitas sistem tax intelligence Daerah Bapenda	Tidak Terbatas
113	Nota penghitungan dan SKPDKB/SKPDKBT sebelum diterbitkan secara resmi	1. UU No. 14/2008 Psl. 6 (e) Ps. 17(b); 2. UU No. 1/2022;	Sengketa prematur, menghambat proses penetapan pajak yang sah	menejga kepastian proses administrasi penetapan pajak daerah	sampai dokumen ditetapkan secara resmi
114	Data rekening / bukti setor pajak daerah per WP tertentu	1. UU No. 14/2008 Ps. 17(h); 2. UU No.10/1998 Psl. 40 (Kerahasiaan Perbankan); 3. UU No. 28/2007 Ps. 34	Pelanggaran kerahasiaan perbankan dan perpajakan, eksploitasi data keuangan WP	Melindungi hak privasi finansial WP Daerah	Tidak Terbatas
115	Laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	UU No. 14 2008 Ps. 17(h)	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak terkait	Melindungi data pribadi wajib pajak	Tidak Terbatas
116	Surat keputusan terkait permohonan WP	UU No. 14 2008 Ps. 17(h)	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak terkait	Melindungi data pribadi wajib pajak	Tidak Terbatas
KECAMATAN SAMARINDA KOTA, KECAMATAN SAMBUTAN, KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG, KECAMATAN SAMARINDA ILIR, KECAMATAN SUNGAI KUNJANG, KECAMATAN SAMARINDA UTARA, KECAMATAN LOA JANAN ILIR					
117	Laporan intelijen & keamanan wilayah (Forkopimcam/muspika) Dokumen hasil rakor rahasia antara camat, kapolsek, dan danramil terkait potensi konflik SARA, radikalisme, atau kerawanan sosial	- UU No. 14/2008 Ps. 17 (a)(c)	Dapat memicu kepanikan warga menggagalkan operasi pencegahan keamanan aperat, dan memperburuk konflik sosial yang sedang ditangani.	Strategi pengamanan wilayah berjalan efektif, ketertiban umum terjaga dan mencegah terjadinya kerodahan di masyarakat	Tidak terbatas
118	Data PBB individu warga meliputi rincian tunggakan pajak pribadi, nilai set / harta kekayaan warga, tagihan spesifik by name by address	- UU No. 14/2008 Ps. 17 (h)	Membuka rahasia kondisi finansial warga yang berpotensi dimanfaatkan untuk penipuan, pemerasan, atau kejahatan lainnya	Melindungi privasi keuangan warga dan mencegah penyalahgunaan data kekayaan pribadi oleh pihak yang tidak berwenang	Tidak Terbatas

119	Berita Acara Proses Penyelesaian Sengketa/Konflik Lingkungan/Tanah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum, dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan tertentu	a. Mencegah terhambatnya proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum b. Dapat melindungi dan mengamankan data	Sampai proses selesai
120	Data raskin (BNBA)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi data rahasia pribadi	Tidak Terbatas
121	Data Pribadi Penerima Bantuan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat melindungi data rahasia pribadi	Tidak Terbatas
122	Informasi tentang Pertanahan yang menyangkut data kepemilikan aset seseorang	- UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h ayat 3 tentang mengungkap	Disalahgunakan oleh pihak lain dan berpotensi sengketa	Melindungi rahasia pribadi	Tidak Terbatas
KECAMATAN LOA JANAN ILIR					
123	Data Izin Usaha Mikro	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengetahui jenis usaha dan pemilik usaha	Melindungi rahasia pribadi dan pemilik usaha menengah	tidak Terbatas dan mendapat izin
KELURAHAN SENGKOTEK, KELURAHAN KARANG ANYAR, KELURAHAN BUGIS, KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR, KELURAHAN LEMPAKE, KELURAHAN SEMPAJA UTARA, KELURAHAN PASAR PAGI, KELURAHAN BANDARA, KELURAHAN SEMPAJA BARAT, KELURAHAN AIR PUTIH, KELURAHAN SIDOMULYO, KELURAHAN SINDANG SARI, KELURAHAN SUNGAI KAPIH, KELURAHAN KARANG MUMUS, KELURAHAN BUKIT PINANG, KELURAHAN DADI MULYA, KELURAHAN SIDODADI, KELURAHAN BUDAYA PAMPANG, KELURAHAN SEMPAJA BARAT, KELURAHAN SEMPAJA SELATAN, KELURAHAN SUNGAI SIRING, KELURAHAN TANAH MERAH, KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM, KELURAHAN LOA BUAH, KELURAHAN LOA BAKUNG, KELURAHAN KARANG ASAM ILIR, KELURAHAN TELUK LERONG ULU, KELURAHAN HARAPAN BARU, KELURAHAN RAPAK DALAM, KELURAHAN SIMPANG TIGA, KELURAHAN TANI AMAN, KELURAHAN BAQA, KELURAHAN GUNUNG PANJANG, KELURAHAN MANGKUPALAS, KELURAHAN SUNGAI KELEDANG, KELURAHAN TENUN, KELURAHAN BANTUAS, KELURAHAN RAWA MAKMUR, KECAMATAN SAMARINDA KOTA, KECAMATAN SAMBUTAN, KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG, KECAMATAN SAMARINDA UTARA, SAMARINDA ILIR, KECAMATAN LOA JANAN ILIR, DAN SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA					
124	Surat-surat masuk dan keluar yang bersifat rahasia	- UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi huruf i	Dapat merugikan proses penyusunan Kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	Sesuai Jadwal Retensi Arsip
125	Data surat keterangan ahli waris	Pasal 17 Huruf h, UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
126	Data pribadi kepegawaian	- Pasal 17 huruf h UU. No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ; UU PDP Pasal 4	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi / jabatan	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	Tidak Terbatas
127	Laporan Keuangan sebelum diaudit	UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pst 6 huruf e	Mengungkap informasi yang masih dalam proses pengolahan	Menjaga informasi yang masih dalam proses pengolahan	Sampai selesai diproses
128	MoU / SPK / Informasi yang masih dalam proses	UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pst 6 huruf e	Mengungkap informasi yang masih dalam proses pengolahan	Menjaga informasi yang masih dalam proses pengolahan	Sampai selesai diproses
PERUMDA VARIA NIAGA					
129	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan secara rinci/detail	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menggangggu kepentingan rencana kerja anggaran perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas

130	Rencana Program Pengembangan Usaha	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan pengembangan usaha perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
131	Informasi data pelanggan selain nama dan alamat	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen	Dapat mengungkap rahasia data pribadi dan kondisi keluarga.	Melindungi rahasia data pribadi dan kondisi keluarga. Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada pelanggeng	Tidak Terbatas
132	Data menyangkut utang piutang pelenggan meupun perusahaan	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen	Dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang dan perusahaan	Melindungi rahasia kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang dan perusahaan. Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada	Tidak Terbatas
133	Pendapatan Direksi dan Karyawan selain Skala Upah	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi rahasia kondisi keuangan, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Tidak Terbatas
134	Data pribadi Direksi dan Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia data pribadi dan kondisi keluarga.	Melindungi rahasia data pribadi dan kondisi keluarga.	Tidak Terbatas
135	Surat menyurat yang sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 tahun 2008	Menghambat jalannya kebijakan	Melindungi proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
136	Dokumen proses penjatuhan disiplin/pelanggaran etika pegawai/karyawan	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, dan pendapatan seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, dan pendapatan seseorang.	Tidak terbatas kecuali yang bersnagkutan langsung atau yang mendapatkan kuasa daripadanya
137	Laporan Keuangan Perusahaan yang Belum Diaudit	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai telah diaudit
138	Data pendukung laporan keuangan (kwitansi, nota) dll	Pasal 17 huruf I UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 44 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dapat menimbulkan informasi yang salah dikarenakan laporan keuangan belum final dan belum diaudit	membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program	Tidak Terbatas
BANK SAMARINDA					
139	Data nasabah penyimpan dan simpanannya	UU KIP Pasal 17 huruf h; UU PDP Pasal 4; UU Perbankan 1998 Pasal 40	Mengungkap kerahasiaan data nasabah	Melindungi kerahasiaan data nasabah	Tidak Terbatas

140	Catatan Keuangan Nasabah yaitu dokumen informasi saldo pada tabungan atau bilyet deposito	UU KIP Pasal 17 huruf h; UU PDP Pasal 4; UU Perbankan 1998 Pasal 41	Mengungkap kerahasiaan catatan keuangan nasabah	Melindungi kerahasiaan catatan keuangan nasabah	Tidak Terbatas
141	Data pinjaman debitur yaitu rincian kreditur debitur, agunan dan analisis kelayakan	UU KIP Pasal 17 huruf h; UU PDP Pasal 4; UU Perbankan 1998 Pasal 42	Mengungkap kerahasiaan data pinjaman debitur	Melindungi kerahasiaan data pinjaman debitur	Tidak Terbatas
142	Pelaporan internal mengenai laporan audit, data penyelesaian fraud, dan laporan pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK), dan regulator lainnya yang bersifat rahasia	UU KIP Pasal 17 huruf i; UU Perbankan 1998 Pasal 33	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak terkait	Melindungi laporan rahasia	Selama masih dalam proses
143	Rencana strategis bisnis Bank yang belum dipublikasikan	UU KIP Pasal 6 huruf c	Mengungkap perencanaan yang belum matang dan dapat menggangu proses bisnis Bank	Melindungi rencana bisnis Bank	Selama masih dalam proses
144	Data sistem terkait keamanan siber dan infrastruktur teknologi Bank	UU ITE Pasal 30,31,32	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga sistem keamanan	Selama masih dalam proses
RSUD INCHE ABDOEL MOEIS, LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH, KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG, UPTD PUSKESMAS PALARAN, UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH, UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO, UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD PUSKESMAS LOA BAKUNG, UPTD PUSKESMAS LOK BAHU,UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG, PUSKESMAS MANGKUPALAS, UPTD INSTALASI FARMASI, PUSKESMAS SUNGAI SIRING, PUSKESMAS SAMARINDA KOTA, PUSKESMAS REMAJA, PUSKESMAS SEMPAJA, PUSKESMAS JUANDA, PUSKESMAS HARAPAN BARU, PUSKESMAS TEMINDUNG, PUSKESMAS WONOREJO, PUSKESMAS AIR PUTIH, LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH, DAN SELURUH PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA					
145	Data riwayat hidup pegawai, hasil evaluasi kapabilitas / intelektual / kompetensi / rekomendasi pegawai, biodata elektronik PNS (Database)	1. UU Keterbukaan informasi publik No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h; 2. UU PDP Pasal 4	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi pejabat / pegawai	Tidak Terbatas
146	Laporan keuangan yang belum claudit	1. UU Keterbukaan informasi Publik No. 14 tahun 2008 pasal 6 huruf e 2. UU Perbankan no.7 tahun 1992 pasal 1 angka 28 pasal 40	Dapat mengungkap identitas rekening orang / badan	Melindungi identitas rekening orang / badan	Setelah proses audit selesai
147	Database Server	1. UU ITE / Informasi & transaksi elektronik no.11 tahun 2008 pasal 30, 31,32	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Sistem Keamanan	Selama diperlukan
148	Data Rekam Medis Pasien	1. UU 17/2023 ttg Kesehatan Pasal 4 2. UU Keterbukaan informasi publik No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h; 3. UU PDP Pasal 4	Data Pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Tidak Terbatas
RSUD INCHE ABDOEL MOEIS, LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH, KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG					
149	Kode Akses Elektronik (Username & Password)	1. UU ITE / Informasi & transaksi elektronik no.11 tahun 2008 pasal 30, 31, 32	Mengungkap sistem keamanan elektronik	Menjaga sistem keamanan elektronik	Selama diperlukan
UPTD PUSKESMAS PALARAN, UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH, UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO, UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD PUSKESMAS LOA BAKUNG, UPTD PUSKESMAS LOK BAHU,UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG, PUSKESMAS MANGKUPALAS, UPTD INSTALASI FARMASI, PUSKESMAS SUNGAI SIRING, PUSKESMAS SAMARINDA KOTA, PUSKESMAS REMAJA, PUSKESMAS SEMPAJA, PUSKESMAS JUANDA, PUSKESMAS HARAPAN BARU, PUSKESMAS TEMINDUNG, PUSKESMAS WONOREJO, PUSKESMAS AIR PUTIH, LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH					

150	Memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU. No.14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Apabila dibuka dapat secara serius menugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, kebarantan, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 1, menganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	20 tahun
151	Data Pasien	Undang-undang no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data Inflvidu (Pasien)	Tidak terbatas
152	Dokumen hasil audit internal yang masih dalam proses pemeriksaan	Pasal 17 huruf i UU KIP	Menimbulkan persepsi yang belum tentu benar	Menjaga indapendensi auditor	Sampai laporan audit final diterbitkan
153	Informasi tentang identitas pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf J b. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 42 ayat (5)	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Segiri terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi.	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Segiri terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi.	5 tahun atau sampai dengan pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Segiri tersebut menyampaikan/membuka sendiri identitasnya sebagai pengadu kepada publik
154	Rahasia Kondisi Kesehatan Pribadi (Nakes dan Pasien)	UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1	1. Untuk kepentingan kesehatan pasien 2. memenuhi aparatur penegak hukum atas permintaan pengadilan. 3. Permintaan atau persetujuan pasien sendiri. 4. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 5. Kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.	Sesuai kode etik kedokteran dan peraturan undang-undang yang berlaku	Tidak terbatas

155	Dokumen Tertentu 1. Risalah rapat, slide presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia; 2. Bahan rapat, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia) komonkes; 3. Matrik tindak lanjut rakorpim; 4. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia; 5. Arsip vital yang menurut sifatnya rahasia; 6. Arsip statis yang menurut sifatnya rahasia; 7. Bralaks (berita faximile) dari perwakilan RI di luar negeri yang bersifat rahasia.	1. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i; 2. UU no. 43 tahun 2009 tentang kearsipan	menyebabkan terganggunya tugas-tugas kedinasan dan privasi orang lain	Terjaganya kinerja organisasi	Sesuai Jadwal Retensi Arsip
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH					
156	Hasil Uji Kesehatan	UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 4 ayat 1	Data Pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Tidak terbatas
157	Identitas penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 4 ayat 1.	Data Pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh

1	Dr. Aji Syarif Hidayatulah, S.Sos., M.Pd	Ketua PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	
2	Muhammad Khadir	Tenaga Ahli Profesional di bidang Informasi	-	
3	Rika Handayani, S.STP	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	
4	Elia Jesika Maning, SH., MH.	Staf Pelaksana / Penyuluh Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda	
5	Regina Bunga Vetza, SH.	Staf Pelaksana	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda	
6	Murhansyah, SP	Prenata Humas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

a.n. WALI KOTA SAMARINDA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH,

NENENG CHAMELIA SHANTI

Unduh **DOKUMEN ASLI** di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 3109A-2026-16-60-010